

PELAPORAN TOTAL PENDAPATAN, PAD, DAN PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

Oleh

Elsa Sari Yuliana¹⁾, Murti Puspita Rukmi²⁾ Bob Mustafa³⁾, V. Ananta⁴⁾

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak

Kota Pontianak, 78124

Email: [1elsasari@polnep.ac.id](mailto:elsasari@polnep.ac.id)

Abstract

The Covid-19 pandemic hit all nations in the world since the end of 2019 until now. One of the efforts to deal with the spread of the Covid-19 virus is to limit human movement in hopes of slowing transmission. With the policy of restriction of movement, it has an impact on the inhibition of economic growth. Economic movements will have an impact on the income of companies and society. This is what underlies the purpose of this study is to analyze the impact of the Covid-19 pandemic on government revenues. This form of research uses qualitative and quantitative methods. The type of data used is secondary data from local government financial statements. This form of research uses qualitative and quantitative methods. The type of data used is secondary data from local government financial statements. Data collection techniques are performed with Documentation, and Library Studies. Analytical techniques with descriptive data analysis methods. This study yielded information that the Covid 19 Pandemic in general has an impact on total local government revenues.

Keywords: Covid19 Pandemic, Government Revenue, Regional Taxes, Regional Levies.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menerpa seluruh bangsa di dunia sejak tahun 2019 akhir hingga kini. Adapun salah satu upaya penanganan penyebaran virus Covid-19 adalah dengan pembatasan gerak manusia dengan harapan memperlambat penularan. Indonesia sendiri sejak bulan Maret tahun 2020 mengambil kebijakan untuk mengurangi mobilitas manusia dengan kampanye kesadaran “Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah”. Disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang didalamnya diatur mengenai pembatasan kegiatan namun tetap harus mempertimbangkan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan terbatasnya gerak masyarakat pada tahun 2020 maka pergerakan

perekonomian pun terlihat stagnan, hal ini tercermin pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tercatat dari laporan BPS bahwa PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar RP15.434,2 triliun dan PDB per kapita sebesar Rp56,9 juta atau US\$3.911,7 (bps.go.id). Tercatat bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 % dibandingkan tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi yang turun tersebut terlihat tidak sejalan jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah tahun 2020. Terlihat pada tabel 1 dibawah ini realisasi penerimaan pemerintah daerah seluruh Indonesia pada tahun 2020 masih lebih besar daripada tahun 2019.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Milyar Rupiah)		
	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH	227.285.812.284	237.729.040.548	260.830.174.420
Pendapatan Asli Daerah	128.723.480.135	149.950.479.622	160.736.758.577
Dana Daerah	108.295.291.940	144.209.417.959	157.247.309.486
Subsidi Daerah	1.788.830.373	2.372.208.727	2.246.124.222
Realisasi Pembiayaan Wilayah Daerah & Pengelolaan	1.047.940.135	4.209.344.240	4.240.121.348
Lain-lain PAD yang sah	17.297.172.720	14.914.670.899	15.746.890.286
Dana Perimbangan	252.285.492.128	278.262.528.624	179.628.928.420
Bagi Hasil Pajak	24.672.248.524	18.222.228.229	22.622.522.222
Bagi Hasil Bukan Pajak/Lain-lain Daerah Lain	22.421.824.502	14.976.922.522	22.127.724.222
Dana Pinjaman Daerah	28.628.224.422	24.924.422.422	28.622.224.222
Dana Pinjaman Ekstern	62.224.224.222	22.224.224.222	22.222.222.222
Lain-lain Pembiayaan yang sah	22.224.224.222	22.224.224.222	22.222.222.222
PENYERAHAN DAERAH	22.224.224.222	22.224.224.222	22.222.222.222
JMLAH	250.060.000.000	260.000.000.000	283.052.396.642

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan sebesar Rp11.111.780.676.000,- dari penerimaan tahun 2019.

Jika dilihat dari perspektif kesehatan masyarakat, memastikan bahwa unit pelayanan kesehatan memiliki semua dana yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis ini adalah yang paling penting. Tapi secara ekonomi, mungkin sumber stres yang lebih besar akan menjadi efek dari resesi yang akan datang. "Social Distancing" berskala besar akan mengurangi pengeluaran konsumen dan upah pekerja, dan pada gilirannya, menyebabkan pendapatan pajak penjualan dan pendapatan anjlok. Sebagai contoh konkrit bahwa pendapatan pajak negara Amerika Serikat turun lebih dari \$ 120 miliar atau sekitar 9 persen selama Resesi Hebat tahun 2008-2009. (Sage Belz and Louise Sheiner: 2020).

"Lockdown" di India berjalan selama 40 hari yang juga mengharuskan penangguhan semua kegiatan ekonomi, kecuali yang diklasifikasikan penting dan yang dilakukan dari rumah. Akibatnya, semua kegiatan ekonomi yang mengharuskan orang untuk bepergian atau bekerja di luar rumah terhenti. Hal ini mempengaruhi pendapatan pemerintah pusat dan negara bagian, terutama pendapatan pajak yang akan dihasilkan dari semua kegiatan ekonomi tersebut. (Suyash Tiwari: 2020).

The World Bank (2020) memprediksi secara umum dampak pandemi Covid-19 akan menyebabkan penerimaan pemerintah mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Pemerintah

Revenue	Possible Impact
Taxes	Decrease
Fees, fines, penalties, and licenses	Decrease
Revenue from exchange transactions	Decrease
Transfers from other government entities (subnational)	Increase
Other revenue	Decrease
Total revenue	Decrease

Sumber: World Bank (2020)

Pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 turun 2,07% namun realisasi penerimaan pendapatan daerah tetap naik 11,57%. Berkaca pula dengan kondisi di Amerika Serikat dan India yang mana pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan pemerintah baik pusat maupun daerah, berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik merumuskan permasalahan berikut "Bagaimana dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Pemerintah".

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar dampaknya pandemi Covid-19 pada total pendapatan pemerintah, pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pemerintah daerah. Dengan diketahuinya dampak pandemi pada pendapatan daerah dan komponennya maka pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan untuk mempertahankan arus pendapatan daerah.

**LANDASAN TEORI
Pandemi Covid-19**

WHO (World Health Organization) secara resmi mengumumkan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi per tanggal 9 Maret 2020. Hal ini berarti, virus corona telah menyebar secara luas di seluruh dunia. Pandemi sebagai suatu istilah terkesan menakutkan tapi

.....

sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Secara umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan hingga sedang, seperti demam dan batuk, serta kebanyakan dapat merasakan sembuh dalam beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan atau diabetes), virus corona menyebabkan masalah kesehatan yang cukup serius. Mayoritas korban berasal dari kelompok berisiko tersebut. (covid-19.go.id).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dinyatakan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan beberapa cara yang telah ditentukan demi upaya pencegahan kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; pembatasan kegiatan sosial dan budaya; pembatasan moda transportasi; serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Manajemen Keuangan Pemerintah

Pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945 memiliki sub-organisasi yang dinamakan pemerintah daerah, oleh sebab itu Indonesia memiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua tingkatan yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota/ pemerintah daerah kabupaten. Berdasarkan teoritis, tidak ada pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang tidak menginginkan masyarakat yang dibawah pimpinannya tidak sejahtera. Kesejahteraan umum dapat tercipta pada

tingkat kemakmuran masyarakat dengan terpenuhinya pangan, sandang, papan dan hal ini juga tercermin pula pada aspek-aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Halim: 2017).

Dalam upaya memenuhi kesejahteraan umum masyarakat pemerintah mengelola keuangannya yang terwujud dalam APBN untuk pemerintah pusat dan APBD untuk pemerintah daerah. Problematika pada aspek pendapatan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana mengoptimalkan perolehan pendapatannya. Optimalisasi pendapatan tersebut dalam bentuk pendapatan pajak maupun pendapatan bukan pajak. (Halim: 2017).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Daerah diberi wewenang untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya persediaan pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan lainnya.

Pendapatan Pemerintah Daerah

Pendapatan pemerintah dibagi menjadi dua bagian besar sesuai dengan ranah pengelolaan keuangan, yaitu pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara tercatat pada APBN dan pendapatan daerah tercatat dalam APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah uang yang masuk melalui rekening kas umum daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari: a) Pendapatan Asli Daerah; b)

Dana Perimbangan; dan c) lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Penelitian Terdahulu

Kondisi serupa yang juga mengglobal adalah krisis moneter. Berdasarkan data Bappenas (2009) selama tahun 2008 pertumbuhan ekonomi negara Indonesia mencapai angka 6,1 persen. Krisis keuangan global memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia dan mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008, yang mana mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun sebesar minus 3,6 persen pada triwulan IV tahun 2008 dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q), serta meningkat 5,2 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV-2007 hal ini juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih lambat dari pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2008 yaitu 6,2 persen di triwulan I, 6,4 persen pada triwulan II, 6,4 persen pada triwulan III.

The World Bank (2020) mengatakan bahwa “*lockdown*” menyebabkan penurunan pajak yang signifikan. Pendapatan terutama dari industri manufaktur, konstruksi, ritel, perjalanan, dan makanan. *Value Added Tax* (VAT) atau di Indonesia dikenal dengan istilah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyumbang sebagian besar penurunan pendapatan pajak. Kerugian yang dialami oleh perusahaan dan tingkat pengangguran juga berdampak pada penerimaan pajak penghasilan badan.

Wabah Covid-19 dapat mempengaruhi posisi fiskal pemerintah daerah baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan. Di sisi pengeluaran, pemda dapat mengalami konsekuensi yang parah dari fase awal penyebaran virus yang mendorong permintaan layanan kesehatan dan belanja ketertiban umum karena *lockdown*. Dari sisi penerimaan, pemda dapat mengalami penurunan penerimaan akibat melemahnya kegiatan ekonomi dan perubahan kebijakan perpajakan (OECD: 2020).

Siti Kurniati dan Tarmizi Achmad (2008) menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi tahun 2008 berbeda dan jika dilihat dari sisi kontribusi pajak daerah sebelum krisis ekonomi (tahun 2005-2007) diperoleh 27,48%. Sedangkan untuk periode sesudah krisis ekonomi (tahun 2008-2010) diperoleh 22,70%. Kontribusi pajak daerah mengalami penurunan dari periode sebelum dengan sesudah krisis ekonomi 2008.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah riset eksploratori dengan teknik analisa deskriptif. Menurut Umar (2008), riset eksploratori atau biasa disebut dengan penjajakan mengenai suatu permasalahan yang belum jelas atau masih relatif baru. Sedangkan analisa deskriptif bertujuan untuk memaparkan variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan keadaan sebenarnya tentang perkembangan dan kontribusi penerimaan daerah di era pandemi covid 19.

Untuk menjawab rumusan masalah dengan pertimbangan penggunaan data yang mutakhir penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk realisasi pendapatan daerah pemerintah kota/ kabupaten dan pemerintah provinsi di Kalimantan Barat.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD tahun 2019-2020 yang diperoleh dari portal resmi Kementerian Keuangan. Sehubungan data yang diperlukan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) Pemerintah Kota/ Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2020 melalui portal www.djpk.kemenkeu.go.id.

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif. Menurut Umar (2008: 105), analisis deskriptif diperlakukan pada variabel-variabel penelitian, tetapi sifatnya sendiri, tidak dikaitkan dengan variabel lain. Berdasarkan variabel tersebut, analisis dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai banyak hal. Sejalan dengan pendapat Umar, Jogiyanto (2007: 163) menjabarkan statistik deskriptif sebagai statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik data yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Adapun data yang dianalisa adalah data total pendapatan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, serta pendapatan transfer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Daerah di Era Pandemi

Adapun gambaran perubahan total pendapatan daerah di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perubahan Total Pendapatan Daerah

PEMERINTAH DAERAH	2019	2020	SELISIH	PERUBAHAN
PROVINSI KALBAR	5.968.209.003.304	5.694.171.001.349	5%	turun
KOTA PONTIANAK	1.764.013.422.653	1.547.165.136.327	14%	turun
KOTA SINGKAWANG	1.840.016.960.000	1.652.222.507.895	11%	turun
KABUPATEN KUBURAYA	1.533.363.622.188	1.477.080.851.351	4%	turun
KABUPATEN MELAWI	1.203.338.371.153	995.804.376.408	21%	turun
KABUPATEN BENGKAYANG	1.138.645.647.927	853.667.170.269	33%	turun
KABUPATEN SAMBAS	1.832.166.794.759	1.518.062.200.019	21%	turun
KABUPATEN KAYONG UTARA	777.160.669.976	633.730.381.882	23%	turun
KABUPATEN KETAPANG	2.372.979.966.093	1.220.207.872.262	94%	turun
KABUPATEN MEMPAWAH	1.032.371.184.000	976.603.858.000	6%	turun
KABUPATEN LANDAK	1.191.747.412.580	1.167.314.021.114	2%	turun
KABUPATEN SANGGAU	1.840.016.960.000	1.652.222.507.895	11%	turun
KABUPATEN KAPUAS HULU	3.673.137.449.395	3.216.496.311.986	14%	turun
KABUPATEN SINTANG	1.932.819.946.000	1.846.946.982.000	5%	turun
KABUPATEN SEKADAU	1.687.936.091.780	1.598.072.060.151	6%	turun
RATA-RATA	29.787.923.501.808	26.049.767.238.906		14%

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 3 terlihat bawah terjadi penurunan merata pada seluruh total pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah di Kalimantan Barat, baik pada tingkat pemerintah provinsi maupun di tingkat pemerintah kota/ kabupaten. Penurunan pendapatan daerah tertinggi

dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 94%, dan terendah dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yaitu sebesar 2%, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebesar 4%. Rata-rata penurunan pendapatan daerah cukup signifikan di era pandemi tahun 2020 yaitu sebesar 20%. Hal ini sesuai dengan prediksi World Bank (2020) bahwa pandemi Covid-19 akan berdampak penurunan pada penerimaan pemerintah secara umum.

Penurunan total pendapatan pemerintah dapat dilihat dari berbagai item yang merupakan bagian dari pendapatan pemerintah daerah. Adapun bagian dari pendapatan pemerintah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan/transfer, dan Pendapatan lainnya yang sah. Adapun dari tiga bagian pendapatan pemerintah ini yang merupakan hasil dari pengelolaan potensi daerah adalah PAD. PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. **Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Era Pandemi**

Berikut adalah gambaran pendapatan asli daerah di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

PEMERINTAH DAERAH	2019	2020	PERUBAHAN
PROVINSI KALBAR	2.301.306.937.992	2.154.145.653.807	turun
KOTA PONTIANAK	478.790.894.895	403.175.414.290	turun
KOTA SINGKAWANG	166.200.430.000	163.382.873.107	turun
KABUPATEN KUBURAYA	172.839.464.395	151.009.789.229	turun
KABUPATEN MELAWI	40.577.160.352	30.872.004.588	turun
KABUPATEN BENGKAYANG	51.957.359.828	54.405.431.384	naik
KABUPATEN SAMBAS	404.280.773.149	129.676.504.956	turun
KABUPATEN KAYONG UTARA	28.597.868.471	39.525.271.732	naik
KABUPATEN KETAPANG	195.238.357.272	231.283.286.171	naik
KABUPATEN MEMPAWAH	87.574.217.000	98.615.210.000	naik
KABUPATEN LANDAK	92.870.330.406	104.159.513.963	naik
KABUPATEN SANGGAU	166.200.430.000	163.382.873.107	turun
KABUPATEN KAPUAS HULU	79.977.091.078	79.165.077.924	turun
KABUPATEN SINTANG	173.272.220.000	134.598.003.000	turun
KABUPATEN SEKADAU	45.360.926.220	47.004.174.690	naik

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat pendapatan asli daerah pada 14 pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Dari data diatas dapat dilihat terdapat 6 (enam) pemerintah daerah yang

mengalami peningkatan PAD yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Mempawah, Landak, dan Sekadau. Selain pemerintah kota/kabupaten tersebut, pemerintah daerah lainnya mengalami penurunan PAD. Hal ini sangat menarik untuk ditelisik lebih lanjut, item dari PAD yang mana yang menyebabkan peningkatan PAD pada 6 pemerintah daerah tersebut.

Tabel 5. PAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51.957.359.828,00	54.405.431.384,00	Rp2.448.071.556,00	-4,71	naik
1. Pajak Daerah	15.826.404.279,00	14.960.676.539,00	-Rp865.727.740,00	5,47	turun
2. Retribusi Daerah	3.187.583.067,00	3.747.175.908,00	Rp559.592.841,00	-17,56	naik
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.959.077.438,00	5.910.385.402,00	Rp951.307.964,00	-19,18	naik
4. Lain-lain PAD yang Sah	27.984.295.044,00	29.787.193.535,00	Rp1.802.898.491,00	-6,44	naik

Sumber: data diolah

Tabel 5 diatas merupakan gambaran rincian PAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dapat dilihat secara umum item-item yang merupakan bagian dari PAD di Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengalami kenaikan, yaitu retribusi daerah naik sebesar 17,56%, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 19,18%, juga lain-lain PAD yang sah naik sebesar 6,44%. Sehingga penurunan pendapatan pajak daerah sebesar 5,47% tidak terlalu berdampak pada total pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkayang.

Tabel 6. PAD Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28.597.868.471,00	39.525.271.732,00	Rp10.927.403.261,00	-38,21	naik
1. Pajak Daerah	5.948.453.498,00	5.312.610.754,00	-Rp635.842.744,00	10,69	turun
2. Retribusi Daerah	8.970.514.872,00	12.084.325.540,00	Rp3.113.810.668,00	-34,71	naik
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.139.473.842,00	2.348.155.372,00	Rp208.681.530,00	-9,75	naik
4. Lain-lain PAD yang Sah	11.539.426.259,00	19.780.180.066,00	Rp8.240.753.807,00	-71,41	naik

Sumber: data diolah

Gambaran rincian PAD Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada Tabel 6. Secara umum item-item yang merupakan bagian dari PAD pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalami kenaikan, terlihat retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 34,17%, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 9,75%, lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan yang cukup signifikan

yaitu sebesar 71,41%. Kenaikan pada 3 item tersebut menyebabkan penurunan pendapatan pajak daerah sebesar 10,69% tidak terlalu berdampak pada total pendapatan asli daerah Kabupaten Kayong Utara sehingga total pendapatan asli daerah tetap mengalami peningkatan.

Tabel 7. PAD Pemerintah Kabupaten Ketapang

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	195.238.357.272,00	231.283.286.171,00	Rp36.044.928.899,00	-18,46	naik
1. Pajak Daerah	102.612.120.725,00	130.004.408.204,00	Rp27.392.287.479,00	-26,70	naik
2. Retribusi Daerah	5.858.936.620,00	9.389.663.336,00	Rp3.530.726.716,00	-60,26	naik
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.360.118.291,00	6.247.663.454,00	Rp887.545.163,00	-16,56	naik
4. Lain-lain PAD yang Sah	81.407.181.636,00	85.641.531.178,00	Rp4.234.349.542,00	-5,20	naik

Sumber: data diolah

Tabel 7 diatas menampilkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang. Dapat dilihat seluruh item dalam penyumbang pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan. Pajak daerah mengalami peningkatan 26,7%, retribusi daerah mengalami peningkatan 60,26%, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 16,56%, serta lain-lain PAD yang sah sebesar 5,20%.

Tabel 8. PAD Pemerintah Kabupaten Mempawah

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	87.574.217.000	98.615.210.000	Rp11.040.993.000,00	-12,61	naik
1. Pajak Daerah	34.746.338.000	33.853.827.000	-Rp892.511.000,00	2,57	turun
2. Retribusi Daerah	7.215.022.000	11.950.268.000	Rp4.735.246.000,00	-65,63	naik
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.670.928.000	4.657.419.000	-Rp13.509.000,00	0,29	turun
4. Lain-lain PAD yang Sah	40.941.929.000	48.153.696.000	Rp7.211.767.000,00	-17,61	naik

Sumber: data diolah

Pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada tabel 8. Terjadi penurunan pendapatan pajak daerah sebesar 2,57% dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,29%. Sedangkan terjadi peningkatan yang cukup besar pada pendapatan retribusi daerah sebesar 65,63% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 17,61%.

Tabel 9. PAD Pemerintah Kabupaten Landak

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92.870.330.406,09	104.159.513.962,77	Rp11.289.183.556,68	-12,16	naik
1. Pajak Daerah	39.212.707.026,00	45.533.159.974,00	Rp6.320.452.948,00	-16,12	naik
2. Retribusi Daerah	2.430.379.133,76	2.140.694.825,85	-Rp289.684.307,91	11,92	turun
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.289.774.614,05	5.014.639.773,23	Rp724.865.159,18	-16,90	naik
4. Lain-lain PAD yang Sah	46.937.469.632,28	51.471.019.389,69	Rp4.533.549.757,41	-9,66	naik

Sumber: data diolah

Untuk pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Landak secara umum juga mengalami kenaikan kecuali retribusi daerah yang mengalami penurunan. Penurunan retribusi daerah sebesar 11,92%. Hal ini serupa dengan rincian pendapatan asli daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sekadau, yaitu penurunan pendapatan terjadi pada item retribusi daerah yaitu sebesar 12,95% yang mana ini tidak bertutupi dengan peningkatan pada komponen lainnya dalam pendapatan asli daerah di Pemerintah Kabupaten Landak dan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Tabel 10. PAD Pemerintah Kabupaten Sekadau

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45.360.926.220,00	47.004.174.690	Rp1.643.248.470,00	-3,62	naik
1. Pajak Daerah	11.889.875.370,00	12.516.632.300	Rp626.756.930,00	-5,27	naik
2. Retribusi Daerah	1.903.591.100,00	1.657.094.400	-Rp246.496.700,00	12,95	turun
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.554.942.060,00	6.702.740.640	Rp147.798.580,00	-2,25	naik
4. Lain-lain PAD yang Sah	25.012.517.690,00	26.127.707.036	Rp1.115.189.346,00	-4,46	naik

Sumber: data diolah

Berdasarkan tampilan PAD pada 6 (enam) Pemerintah Daerah diatas, item yang banyak mengalami penurunan adalah pajak dan retribusi daerah, sedangkan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah cenderung terus naik. Hal ini menunjukkan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah merupakan item dari PAD yang tidak terdampak pandemi covid 19. Oleh sebab itu sebaiknya pemerintah daerah lebih lagi dalam mengembangkan potensi perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Transfer di Era Pandemi

Pendapatan Transfer yang diterima oleh pemerintah kota/kabupaten serta provinsi di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 11. Perubahan Pendapatan Transfer

PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN TRANSFER		SELISIH	PERUBAHAN
	2019	2020		
PROVINSI KALBAR	3.635.394.245.312	3.506.829.941.604	4%	turun
KOTA PONTIANAK	945.027.112.787	868.690.778.446	9%	turun
KOTA SINGKAWANG	722.300.230.000	629.532.976.737	15%	turun
KABUPATEN KUBURAYA	1.084.951.262.529	964.995.503.675	12%	turun
KABUPATEN MELAWI	887.188.315.638	714.361.740.201	24%	turun
KABUPATEN BENGKAYANG	1.035.110.481.959	748.269.188.885	38%	turun
KABUPATEN SAMPAS	1.579.607.750.001	1.337.393.145.063	18%	turun
KABUPATEN KAYONG UTARA	724.640.428.504	567.084.225.321	28%	turun
KABUPATEN KETAPANG	2.091.169.640.417	902.403.405.036	132%	turun
KABUPATEN MEMPAWAH	785.681.087.000	691.997.751.000	14%	turun
KABUPATEN LANDAK	1.034.149.326.660	1.026.185.236.151	1%	turun
KABUPATEN SANGGAU	722.300.230.000	629.532.976.737	15%	turun
KABUPATEN KAPUAS HULU	1.704.834.601.757	1.468.343.354.374	16%	turun
KABUPATEN SINTANG	1.313.364.775.000	1.194.279.446.000	10%	turun
KABUPATEN SEKADAU	722.300.230.000	629.532.976.737	15%	turun
RATA-RATA	18.988.019.717.564	15.879.432.645.967	20%	

Sumber: data diolah (2021)

Secara umum pendapatan transfer pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami penurunan di era pandemi ini dengan rata-rata penurunan sebesar 20%. Adapun penurunan tertinggi dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, yaitu sebesar 132% dan terendah dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak yaitu sebesar 1%. Penurunan ini sesuai dengan prediksi World Bank (2020) bahwa pandemi covid 19 berdampak pada penurunan nilai *transfer from other government entities*.

PENUTUP

Kesimpulan

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah total pendapatan daerah pada pemerintah daerah kota/kabupaten dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di era pandemi mengalami penurunan hal ini sejalan dengan prediksi World Bank (2020). Namun berbeda dengan perkembangan pendapatan asli daerah, sebab pada 6 pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat justru mengalami peningkatan

Saran

Saran yang diberikan penulis atas penelitian ini,

1. Pemerintah Daerah dapat melihat potensi daerahnya yang kiranya dapat membantu daerah meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga tidak terlalu terdampak dari pandemi covid 19.
2. Tambah daerah amatan, seperti seluruh kota/ kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Tambah tahun amatan, seperti tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Halim. 2017. Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (APBN/D). Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.
- [2] KPCPEN. 2020. Definisi Pandemi. Tersedia [online] di: <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>. Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 14.08.
- [3] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [5] Sage Belz and Louise Sheiner. 2020. [How will the coronavirus affect state and local government budgets?](https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/03/23/how-will-the-coronavirus-affect-state-and-local-government-budgets?). Tersedia [online] di: <https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/03/23/how-will-the-coronavirus-affect-state-and-local-government-budgets?>. Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 12.57.
- [6] Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Santoso, Singgih. 2012b. Aplikasi SPSS pada Statistik Non Parametrik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [8] Siti Kurniati dan Tarmizi Achmad. 2008. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008. Tersedia [online]: [JURNAL SITI KURNIATI \(undip.ac.id\)](http://JURNAL_SITI_KURNIATI(undip.ac.id)) Diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 13.15.
- [9] Suyash Tiwari. 2020. Impact of Lockdown on Government Revenue. Tersedia [online] di: <https://prcindia.org/theprsblog/impact-lockdown-government-revenue>. Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 13.26.
- [10] The World Bank. 2020. Government Financial Reporting in Times of the Covid-19 Pandemic. Tersedia [online] di: [154283.pdf \(worldbank.org\)](https://www.worldbank.org/154283.pdf) Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 17.50.
- [11] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.